

# Data Beras Kacau, Kebijakan pun Berubah-ubah

Rabu , 24 Oktober 2018 | 09:14

[http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/4325/data\\_beras\\_kacau\\_kebijakan\\_pun\\_berubah\\_ubah](http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/4325/data_beras_kacau_kebijakan_pun_berubah_ubah)



Sumber Foto Istimewa Ilustrasi

Kalau saja pemerintah cermat dan akurat dalam membaca produksi beras nasional, kiranya tak akan terjadi kisruh masalah impor bahan pangan itu. Pemerintah harus merevisi kebijakannya, namun tampaknya permasalahannya tidak akan selesai sebelum dilakukan evaluasi dan pembenahan manajemen pengadaan beras nasional secara menyeluruh.

Anehnya, perbedaan data produksi beras nasional sangat tajam antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah terjadi bertahun-tahun dan pemerintah membiarkannya saja. Kedua instansi tersebut menyodorkan data produksi yang surplus, meski angkanya jauh berbeda, tapi mengapa terjadi penurunan stok beras di Bulog? Inilah pangkal kebijakan impor beras tahun ini yang menimbulkan polemik berkepanjangan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pekan ini memastikan tahun ini tidak lagi impor beras. Ternyata kita surplus, setidaknya sesuai data Kementan dan BPS. Sayangnya, kedua instansi tersebut menyodorkan data yang perbedaannya sangat jauh. "Memang yang punya data produksi hanya ada dua, Kementerian Pertanian dan BPS. Tapi ini juga enggak cocok," kata Menko Perencanaan Darmin Nasution, Kamis (20/9).

Kalau kedua instansi itu mencatat surplus beras nasional, dimana beras tersebut disimpan? Apalagi data Kementan tercatat surplusnya besar. "Setiap tahun surplus 11

juta ton, terus ke mana perginya. Itu angkanya terus tidak berubah. Itu yang sudah dicari solusinya, Biar BPS saja yang melakukan penyempurnaan," tegas Darmin.

Kisruh yang terus berlanjut mengenai pengadaan beras nasional menunjukkan bahwa kita memang belum beranjak maju. Perbedaan data produksi yang disodorkan kedua instansi itu menimbulkan konsekuensi yang menyulitkan dalam pengambilan keputusan. Selain kisruh mengenai data produksi, pemerintah juga tidak beres dalam mengelola stok beras nasional melalui Bulog. Data stok Bulog yang menipis itulah yang kemudian menjadi dasar keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton.

Setelah dilakukan impor, kita semua kemudian ribut. Bahkan ada tudingan bahwa di balik kebijakan impor tersebut ada kepentingan terselubung terkait penggalangan dana untuk kepentingan politik. Maklum saja, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita adalah kader parpol sehingga rawan menjadi sasaran tembak.

Kini Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat lain lagi. Ia memastikan tak akan ada impor beras tahun ini karena pasokan aman dan harga pun relative stabil. "Dasar impor itu kalau stok di bawah 1 juta ton di Bulog dan harga naik sampai dengan 10 persen," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. "Kondisi sekarang tidak memenuhi syarat untuk impor."

JK mengatakan, saat ini terdapat stok 2,2 juta ton beras di Bulog. Harga beras pun terpantau stabil dan diperkirakan tak bergejolak hingga akhir tahun. Dia mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memprediksi surplus beras sebanyak 2,85 juta ton pada 2018. Perhitungan ini dilakukan dengan metodologi mutakhir hasil kerjasama BPS, LAPAN, BIG, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Kita ingin mendorong pemerintah untuk bekerja lebih cermat dan bijaksana sebelum menerapkan sebuah keputusan. Berubah-ubahnya keputusan pemerintah akan membingungkan masyarakat, selain menimbulkan dugaan ada udang di balik batu. Keputusan stop impor beras setelah munculnya berbagai kritik para pakar dan masyarakat tentu merugikan citra pemerintah sendiri, seolah bekerja tanpa landasan yang kuat.

Janganlan kita bermain-main dengan masalah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kita jangan menganggap enteng masalah pangan dan beras ini karena konsekuensinya sangat luas. Jutaan petani menggantungkan kehidupannya di sector ini, sehingga keputusan pemerintah yang keliru akan berdampak merugikan mereka.

Kita juga ingin mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit perberasan ini, terkait dengan perbedaan data produksi yang sangat besar. Audit itu juga termasuk penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk program peningkatan produksi beras, sejauhmana efektifitas penggunaannya. Bila terjadi penyelewengan anggaran, maka BPK bisa menyerahkan datanya ke KPK.

Sumber Berita:Berbagai sumber